

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) BERLATAR BELAKANG KESEHATAN PADA
PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

JULI JUWITA
NPM. 2410018412006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg.: 007/MH/Kes/85/III-2026

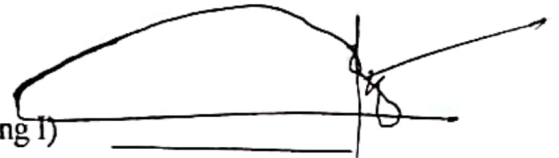
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 011/MH/Kes/84/IX-2025

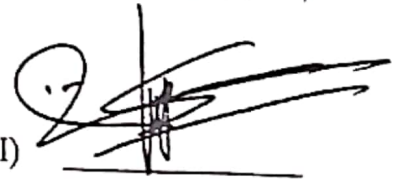
Nama : Juli Juwita
NPM : 2410018412006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Berlatar Belakang Kesehatan Pada Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi Di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Prof. Dr. dr. Afriwardi, S.H., Sp.K.O., MA. (Pembimbing I)



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Pembimbing II)



LEGAL PROTECTION FOR COMMITMENT MAKING OFFICIALS (PPK) WITH HEALTH BACKGROUNDS IN THE IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION WORKS AT THE PAYAKUMBUH CITY HEALTH OFFICE

Juli Juwita¹, Afriwardi², Sanidjar Pebrihariati¹
Master of Law Study Program, Faculty of Law,
Bung Hatta University
julijuwita6@gmail.com

Commitment Making Officers (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) in the implementation of construction projects at the Health Office of Payakumbuh City are often appointed from structural officials who have educational backgrounds in the health sector. The formulation of the problems in this study are: (1) how the forms of legal protection for Commitment Making Officers (PPK); (2) what obstacles are faced by Commitment Making Officers (PPK) with a health background in the implementation of construction works; and (3) what efforts are made as a consequence of legal protection for Commitment Making Officers (PPK) with a health background in the implementation of construction works at the Health Office of Payakumbuh City. The results of the study show that the forms of legal protection available consist of two types, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The obstacles faced by the Commitment Making Officers include: (1) lack of technical competence in construction; (2) the complexity of regulations related to government procurement of goods/services and construction services; and (3) legal risks and concerns about criminalization. Efforts made to address these issues include improving the competence of PPK in construction and government procurement of goods and services, as well as providing legal protection from the local government through the establishment of Standard Operating Procedures (SOP) as a form of preventive protection by the Inspectorate and the local government.

Keywords: legal protection, Commitment Making Officer, health personnel, construction work.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui Pasal 28H ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 34 yang menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia sekaligus

tanggung jawab negara. Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan sistem kesehatan sekaligus mekanisme pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh pemerintah. implementasinya di daerah, seperti pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan¹.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis telah melakukan penelitian

¹ Tjandra Yoga Aditama, Kesehatan Masyarakat dan system kesahatan nasional,

Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berbagai publikasi dan pandangan akademik

dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BERLATAR BELAKANG KESEHATAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh?
3. Apa saja Upaya yang dilakukan sebagai konsekwensi perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh?

3. Untuk Menganalisa upaya yang dilakukan sebagai konsekwensi perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (sosio legal *research*). Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dengan efektifitas hukum. Penelitian ini suatu kajian untuk melihat kenyataan atau relitas sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat, sedangkan sudut pandang hukum untuk mengetahui apakah hukum tersebut di laksanakan²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berlatar Belakang Kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Perlindungan hukum preventif dan represiv.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lingkungan dinas kesehatan (seperti pembangunan puskesmas, renovasi rumah sakit daerah, atau pembangunan laboratorium kesehatan) memiliki kompleksitas teknis dan hukum yang tinggi.

² Amiruddin dan Zainal Asilkrin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 134

C. Upaya yang dilakukan sebagai konsekuensi perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Perlindungan hukum terhadap PPKB bukan hanya bersifat normatif, tetapi harus diikuti dengan upaya konkret sebagai konsekuensi dari tanggung jawab jabatan. Upaya ini bertujuan meminimalkan risiko administratif, perdata, maupun pidana dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang tersedia preventif dan represif
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah Kendala Kompetensi Teknis Konstruksi Kompleksitas Regulasi Pengadaan dan Jasa Konstruksi
3. Upaya yang dilakukan sebagai konsekuensi perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh

B. Saran

1. Agar penempatan PPK sesuai kompetensi teknis
2. Agar Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Daerah perlu lebih aktif melakukan pendampingan preventif, bukan hanya pengawasan represif,
3. Agar Penyediaan Bantuan dan Perlindungan Hukum Institusional Pemerintah daerah perlu

menetapkan mekanisme baku pemberian bantuan hukum bagi PPK yang menghadapi permasalahan hukum sepanjang bertindak dengan itikad baik dan sesuai prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bambang, Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Radja Grafindo Persada

Soekonto, Sri Mamudji. 2019. *penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

B. Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. Sumber Lain

Metasari, Yelly. *Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* — *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No. 1, 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.**
2. Dosen Pembimbing 1 Tesis penulis **Prof. Dr. dr. Afriwardi, S.H., Sp.K.O., MA** yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Dosen Pembimbing 2 Tesis penulis Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H** yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Kedua orang tua, Anak-anak ku tercinta, serta orang-orang terdekat yang selalu memberikan doa, dukungan.

